

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Kedaulatan Rakyat
Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 6

UPPD Blora Mampu Hasilkan PAD di Tengah Pandemi Covid-19

KOMISI C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Blora. Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, termasuk di Blora, namun Kabupaten satu ini masih mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian kinerja UPPD Blora memang tidak diragukan. Meski menghadapi pandemi covid, kinerja tidak surut. Paparan UPPD Blora dari dulu mengagumkan, kinerjanya luar biasa. Komisi C DPRD Jawa Tengah mengapresiasi kinerja pimpinan UPPD Blora.

Menurut keterangan yang disampaikan Kepala UPPD Blora, Achmad Susworo selama pandemi Covid -19 ini pencapaian PAD memang melambat. Per Agustus 2020, jumlah pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 50.823 miliar (57,56% dari target), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 25,323 miliar (46,28%), Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 48,9 juta (76%). Total pajak daerah (termasuk retribusi dan denda-denda) terrealisasi Rp 76,195 miliar, atau 53,25 persen dari target Rp 143 miliar.

Banyak kendala yang dihadapi UPPD di

saat pandemi sekarang ini. Masyarakat yang dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, cenderung untuk menunda pembayaran pajak dan retribusi dan mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2019, UPPD Blora berhasil memperoleh 105,01 persen dari target atau sekitar Rp127 miliar. Pada periode 2018 UPPD Blora juga mampu mengumpulkan Rp 115 miliar atau 106,33 persen dari target. Untuk itu, Komisi C DPRD Jawa Tengah berharap daerah

lain di Jateng juga akan mampu menghasilkan PAD seperti di Blora.

Diakui, untuk bisa meraih target PAD di saat pandemi covid memang tidak mudah, karena banyak masyarakat yang terkena dampak. Mulai dari PHK hingga penerapan peraturan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat oleh pemerintah. Namun dengan kinerja yang bagus diyakini PAD tetap akan bisa terserap. (*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)